

Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Negara Penempatan Malaysia Untuk Peningkatan Kapasitas dan Persiapan Kemandirian

Devi Mariatul Qiptiah*¹, Muallief Umar², Dian Sudiantini³

¹ Universitas Mochammad Sroedji, ²STAI Miftahul Ula, ³Univ. Bhayangkara Jakarta Raya
devihusein89@gmail.com, mualliefumar2202@gmail.com, dian.sudiantini@dsn.ubharaya.ac.id

Abstrak

KBRI Malaysia menampung sebanyak kurang lebih 200 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah dengan pelanggaran hukum, kekerasan fisik dari majikan, pembayaran gaji yang tidak sesuai, shock culture, dan berbagai permasalahan lainnya sehingga para PMI harus memutus hubungan kerja dan ditampung sementara di KBRI Malaysia. Para PMI yang sedang dalam proses pemulangan ke Indonesia perlu dibekali ketrampilan dan wawasan yang luas agar menjadi masyarakat mandiri ketika kembali ke kampung halaman di Indonesia. Oleh karena itu kegiatan PKM ini bekerjasama dengan Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur - Malaysia, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia Universitas Pendidikan Sultan Idris (PPI UPSI) Malaysia. Sebanyak 328 akademisi dari 114 Perguruan Tinggi di Indonesia dan 1 Perguruan Tinggi di Malaysia, ikut berkolaborasi dalam kegiatan PKM Internasional ini. Peserta (PKM) Internasional terdiri dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan persiapan kemandirian para Pekerja Migran Indonesia. Kegiatan PKM diisi dengan berbagai pelatihan keterampilan yang dilaksanakan secara daring dan luring sejak September-Desember 2023. Hasil dari PKM ini adalah peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh para PMI sebagai bekal persiapan kemandirian ketika kembali ke kampung halaman baik di bidang ekonomi kreatif, kepedulian kesehatan mental, serta modal untuk membuka lapangan kerja.

Kata Kunci: pekerja migran Indonesia, pemberdayaan, kemandirian

Abstract

The Indonesian Embassy in Malaysia accommodates approximately 200 Indonesian Migrant Workers (PMI) who have problems with violations of the law, physical violence from employers, inappropriate salary payments, culture shock, and various other problems so that Indonesian migrant workers must terminate their employment relations and be temporarily accommodated at the Indonesian Embassy in Malaysia. Indonesian migrant workers who are in the process of returning to Indonesia need to be equipped with skills and broad insights in order to become independent communities when returning to their hometowns in Indonesia. Therefore, this PKM activity is in collaboration with the Education Attaché of the Embassy of the Republic of Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur - Malaysia, and the Indonesian Student Association of Sultan Idris University of Education (PPI UPSI) Malaysia. A total of 328 academics from 114 universities in Indonesia and 1 university in Malaysia collaborated in this PKM International activity. International PKM participants consisting of lecturers, students and education staff strive to increase the capacity and preparation for the independence of Indonesian Migrant Workers. PKM activities are filled with various skills trainings carried out online and offline from September-December 2023. The result of this PKM is an increase in the skills possessed by migrant workers as a provision for preparation for independence when returning to their hometowns both in the field of creative economy, mental health care, and capital to open jobs.

Keywords : Indonesian migrant workers, empowerment, independence.

DOI: <https://doi.org/10.47134/comdev.v5i2.273>

*Correspondensi: Devi Mariatul Qiptiah

Email: devihusein89@gmail.com

Received: 30-05-2024

Accepted: 11-07-2024

Published: 23-07-2024



Journal of Community Development is licensed under a [Creative Commons Attribution-4.0 International Public License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Copyright: © 2024 by the authors.

I. PENDAHULUAN

Perempuan menempati rating tertinggi menjadi pekerja migran Indonesia, karena lapangan kerja yang dijanjikan lebih mengutamakan atau membutuhkan tenaga migran perempuan dibanding laki-laki. Hal ini memicu minat yang tinggi pada perempuan Indonesia yang mengalami finansial rendah dan membutuhkan lapangan kerja yang sifatnya segera dan menjanjikan dari segi penghasilan. Demi mendapatkan kesempatan ini, maka tidak sedikit juga yang menempuh jalur non prosedural (Matompo & Vivid Izziyana, 2022). Perspektif yang kuat pada masyarakat bahwa migrasi ke kota atau ke luar negeri akan meningkatkan angka kesejahteraan masih belum terpecahkan (Sosiologi dkk., t.t.)

Pencegahan PMI Non Prosedural melalui SE Dirjen Imigrasi Nomor IMI 0277.GR.02.06 Tahun 2017. Di mana menekankan peran aktif Imigrasi khususnya 125 UPT Kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam memberikan perlindungan bagi calon Pekerja Migran Indonesia, peran Kantor Imigrasi dalam hal ini berperan melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penerbitan dokumen perjalanan bagi pemohon yang rentan menjadi PMI Non prosedural (Achmad Setiawan. S, 2020)

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Daka Tegar Priambodo yakni tentang penanganan pengaduan yang diperuntukkan pekerja migran juga berhasil dilakukan. Penanganan ini menganalisis tentang pelayanan publik terhadap berbagai keluhan dari pekerja migran. Layanann yang dikaji berupa pengaduan atau *complaint handling* yang meliputi aspek-aspek mekanisme dan alur atau prosedur yang jelas dan mudah. Hal ini bertujuan untuk membantu meringankan permasalahan yang sedang dialami oleh para pekerja migran (Priambodho, t.t.).

PKM Internasional ini bertema “Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Negara Penempatan Malaysia untuk peningkatan kapasitas dan persiapan kemandirian. Kegiatan ini merupakan bagian dari perwujudan kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai salah satu kewajiban akademisi dalam berkontribusi nyata kepada masyarakat. Para akademisi dalam kegiatan PKM Internasional ini berkontribusi positif kepada masyarakat Internasional, khususnya dalam menjawab keresahan dan isu-isu yang terjadi di masyarakat Internasional, demi menciptakan masyarakat yang tangguh, maju, dan berorientasi pada perkembangan, serta mewujudkan masyarakat madani yang berperadaban maju.

Target penerima manfaat dari kegiatan PKM Internasional ini adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) binaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur. Bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada PMI berupa pengetahuan dan skill tentang Pendidikan, Kesehatan, Hukum, Ekonomi Bisnis, Sosial, Budaya, Bahasa, Moral Etika untuk peningkatan kapasitas dan persiapan kemandirian saat kembali ke Indonesia atau menjadi tenaga kerja di tempat yang lain. Menurut laporan dari koordinator bagian Protokol dan Konsuler KBRI Kuala Lumpur pada bulan Juli 2023 bahwa rata-rata terdapat sekitar 100-200 PMI dalam pembinaan KBRI Kuala Lumpur pada setiap bulannya. Sejumlah PMI tersebut dibina dikarenakan berbagai kasus yang dialami seperti perseteruan dengan majikan, kasus ketidakadilan, kecurangan dalam pembayaran gaji, pelecehan dan kekerasan, termasuk juga kasus ketidaklengkapan dokumen. PMI tersebut mendapatkan pembinaan intensif dan kemudian dipulangkan ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia memiliki prosedur khusus terhadap perlindungan dan penanganan pekerja migran bermasalah, baik saat pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan (Febrianti & Afifah, 2023). Sejak saat pra penempatan, pekerja migran telah mendapat motivasi dan pelatihan khusus dari Dinas Ketenagakerjaan melalui berbagai ketrampilan khusus yang diperlukan saat penempatan. hal tersebut juga dapat meningkatkan hubungan yang kuat dan besar antar pekerja migran di berbagai negara karena terdapat komunikasi saat pra penempatan. (Jungjungan Simamora BPSDM Provinsi Kalimantan Barat & Gusti Johan, 2021). Permasalah signifikan bermula saat pandemic covid-19 yang mana terjadi kerentanan masalah karena pemutusan kerja terhadap pekerja migran penempatan Malaysia yang mengharuskan mereka kembali ke Indonesia atau bertahan di Malaysia dengan pekerjaan yang tidak pasti. (Aswindo dkk., t.t.). Berbagai upaya pencegahan terhadap timbulnya permasalahan pekerja migran juga melalui berbagai hal seperti pengecekan ulang dokumen, sosialisasi ke daerah, sampai kerjasama dengan satgas pencegahan pencegahan

pekerja migran telah dilakukan pemerintah. Namun minat masyarakat menjadi pekerja migran (illegal) tetap tinggi kendati mengetahui berbagai resiko yang harus ditanggung oleh mereka (Skaut & Triputro, t.t.). sosialisasi ke desa yang merupakan tempat best practice pekerja migran juga perlu difokuskan kembali dengan melakukan anggaran dari dana desa karena profesi pekerja migran diminati oleh mayoritas masyarakat dari pedesaan (Dan & Kharisma, 2023). Selain itu, pelatihan ketrampilan di negara penempatan juga dilakukan untuk mengasah skill pekerja migran seperti peningkatan pemahaman dan wawasan literasi digital yang dapat menjadi bekal bagi pekerja migran untuk mengaktualisasikan skill kerja (Fadillah dkk., 2023). Pelatihan tentang remitan juga diberikan kepada para pekerja migran agar mampu mengelola keuangan dan investasi di desa tempat tinggal, serta menjadi purna pekerja migran yang kreatif dan mandiri, mengembangkan usaha di desa, dan tidak kembali menjadi pekerja migran (Dewandaru dkk., t.t.). Selain berbagai ketrampilan tersebut, pekerja migran juga perlu diberi penyuluhan tentang menjaga kesehatan secara mandiri, salah satunya tentang dagusibu, yakni mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat. Ketrampilan dalam swamedikasi sangat diperlukan pekerja migran agar tetap hidup sehat dan bekerja maksimal tanpa selalu terganggu kesehatannya (Lia Yunita dkk., 2021).

Adapun tujuan kegiatan PKM adalah:

1. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang dapat diterapkan secara riil kepada masyarakat,
2. Meningkatkan kapasitas kewirausahaan dalam masyarakat, lembaga pemerintah, swasta serta pendampingan usaha mikro kecil dan menengah;
3. Memberikan informasi, pengajaran dan pembelajaran mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan serta memobilisasi massa/komunitas ke arah masa depan yang lebih baik (sustainably developed);
4. Pemecahan masalah serta pemberian bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana;
5. Meningkatkan kinerja serta capacity building masyarakat menuju kemandirian, peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat PKM ini adalah masyarakat khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) binaan KBRI Kuala Lumpur memperoleh berbagai manfaat dari pelaksanaan PKM Internasional ini yaitu berupa ilmu, pengetahuan, skill, serta akses informasi, pendidikan dan pengembangan ekonomi. Kegiatan ini juga berefek luas memberi manfaat kepada masyarakat umum dalam peningkatan kesejahteraan sosial, psikologis, kesehatan dan juga perekonomian.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internasional dilaksanakan secara hybrid (online dan offline) bertempat di Aula Hasanuddin Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia. Secara keseluruhan, persiapan program PKM ini dilaksanakan selama satu semester $\pm$ 6 bulan mulai dari survey kebutuhan dan building rapport, penyusunan proposal, TOR kegiatan dan sosialisasi, penggalangan dana dan dukungan, pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan luaran, pelaporan dan evaluasi.

Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak. Menurut sumber data yang digunakan BPS dalam hasil sensus penduduk dan proyeksi penduduk, Jumlah penduduk Indonesia di tahun 2023 adalah 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023 (Data BPS, 2023, t.t.). Dengan banyaknya jumlah penduduk yang besar, juga tidak didukung dengan banyaknya lapangan kerja, sehingga banyak dari warga negara yang mencari pekerjaan di negara lain. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar negeri.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu pihak penyumbang devisa negara terbesar. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berlatar belakang beragam dan berbeda, seringkali mengalami permasalahan. Permasalahan yang sering dialami TKI, yaitu: kurangnya perlindungan hukum; tidak memiliki dokumen resmi; kurangnya pengawasan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setelah berada di luar negeri; sulitnya akses

untuk berkomunikasi dengan KBRI. Oleh karena itu untuk melindungi pekerja migran di luar negeri, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia harus mendapat perlindungan yang baik sebagaimana amanat dari Undang-undang dalam jaminan pemenuhan hak pekerja sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Namun, implementasi aturan ini masih dari jauh dari kata sempurna. Namun demikian permasalahan terkait pemalsuan dokumen, kurangnya pendidikan dan pelatihan yang didapatkan PMI baik sebelum diberangkatkan maupun selama berada di negara asing.

Pemerintah terus memperbaiki perlindungan terhadap pekerja migran dengan beberapa upaya, yaitu: melakukan pendataan TKI dengan benar dan akurat; memperkuat perlindungan dan aturan hukum terhadap pekerja migran; meningkatkan pengawasan, mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan hingga penempatan yang dilakukan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI); meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah terkait penjagaan perbatasan agar tidak terjadi penyelundupan TKI tanpa dokumen; melakukan kerja sama antara KBRI dan BP2MI dengan agen-agen pekerja migran setempat untuk memantau keberadaan pekerja migran; mendorong peran aktif KBRI dalam operasi rutin yang dilakukan pihak keamanan negara setempat sehingga para TKI yang bermasalah mendapat perlindungan dan terhindar dari kekerasan.

Sementara itu dosen, tendik dan mahasiswa sebagai masyarakat akademis memiliki tanggung jawab strategis dalam masyarakat yang salah satunya dijalankan melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Wacana kolaborasi Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang digagas ini merupakan sebuah kesepakatan bersama antar Perguruan Tinggi seluruh Indonesia untuk konsisten berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat sesuai dengan kepakaran bidang masing-masing. Program-program yang dilaksanakan merupakan kesesuaian dengan kebutuhan PMI saat ini, dimana PMI perlu diberikan pemahaman dan pelatihan guna peningkatan keterampilan dalam penyiapan kemandirian, yaitu: (1) PMI mendapatkan pengetahuan, keterampilan, motivasi dan semangat untuk bangkit kembali menjadi pribadi yang matang, memiliki kapasitas dan siap berdikari dan mandiri; (2) Program follow up dimana PMI memiliki kesempatan mendapatkan modal usaha setelah kepulangan ke Indonesia.

II. METODE

M Pelaksanaan Program PKM Internasional ini dilaksanakan dengan beberapa urutan pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 1. Urutan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internasional

No	Nama Kegiatan	Waktu (2023)	Sasaran	Tempat
1	Survey Kebutuhan dan <i>Building Rapport</i>	Agustus, September	Mitra dan Beneficiaries	KBRI KL; Online
2	Penyusunan Proposal dan TOR Kegiatan	September	-	-
3	Sosialisasi Kegiatan	September	Mitra dan Akademisi PT	Online
4	Pendaftaran peserta delegasi	September	Akademisi PT	Online
5	Technical Meeting dan Seleksi Pemateri	Oktober	Mitra dan Peserta PKM Inter	Online

6	Kegiatan Pertama	14 Oktober	PMI	KBRI KL (Hybrid)
7	Penyusunan luaran kegiatan	Oktober	-	-
8	Kegiatan Kedua	11 November	PMI	KBRI KL (Hybrid)
9	Penyusunan luaran kegiatan	November	-	-
10	Konten Edukasi PMI	November Desember	PMI yang telah kembali ke Indonesia	Channel Youtube
11	Technical Meeting	Desember	Mitra dan Peserta PKM Inter	Online
12	Kegiatan Ketiga	10 Desember	PMI	KBRI KL (Luring)
13	Penyusunan luaran kegiatan	Desember	-	-
14	Pelaporan dan Evaluasi	Desember s/d Januari	Mitra dan Peserta PKM Inter	Online

Program PKM Internasional ini merupakan kali kedua setelah PKM pertama dilaksanakan pada Juli 2023. Survey kebutuhan dilakukan melalui wawancara dan kuesioner yang disebarakan kepada PMI binaan KBRI Kuala Lumpur. Sementara wawancara dilakukan dengan beberapa pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur untuk mendapatkan data tentang kebutuhan kegiatan yang penting diberikan untuk PMI binaan KBRI Kuala Lumpur. Selanjutnya *building rapport* dengan pihak KBRI dan PPI UPSI serta menyepakati bentuk kolaborasi, program kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan PKM Internasional.

Berdasarkan hasil survey diperoleh informasi bahwa PMI memerlukan edukasi yang berkaitan dengan kesehatan, psikologi, keperawatan, ekonomi bisnis khususnya cara menumbuhkan kemandirian ekonomi kreatif, manajemen diri dan keuangan, sosial budaya, bahasa, hukum dan pendidikan serta dalam bidang pertanian dan perikanan. Dengan demikian disepakati hari dan tanggal pelaksanaan kegiatan PKM Internasional pada tanggal 14 Oktober 2023, 11 November 2023, dan 10 Desember 2023. Kegiatan PKM Internasional ini dilaksanakan oleh LSM Sharing kolaborasi dengan 115 Universitas di Indonesia dan Malaysia. Adapun mitra Program PKM Internasional ini adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perhimpunan Pelajar Indonesia Universitas Pendidikan Sultan Idris (PPI UPSI) Malaysia. Sementara penerima manfaat kegiatan ini adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI). PMI penerima manfaat merupakan PMI binaan KBRI Kuala Lumpur di mana sedang ditampung di shelter KBRI Kuala Lumpur dikarenakan berbagai alasan seperti: memiliki permasalahan dengan majikan, tidak mendapatkan hak sesuai kesepakatan, tidak adanya kontrak kerja diawal, mendapatkan pelecehan, kekerasan, berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK), tidak memiliki kelengkapan dokumen, dan lain sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dilaksanakan di Aula Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur. Terdapat tiga ruangan (Room A, B, dan C) guna terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. Semua peserta PKM menjadi narasumber dan asisten narasumber, yang tersebar dalam tiga ruangan. Sementara PMI yang hadir berjumlah total 200 orang, tersebar dalam ruangan A, B, dan C setelah acara pembukaan. Setiap pemateri mendapatkan waktu 30 menit untuk memberikan materi secara interaktif. Materi diberikan secara interaktif, menarik, dengan menggunakan beberapa metode seperti pelatihan, role play, games, workshop, experiential learning, focused group therapy (FGD), konseling kelompok, dan analisis kasus.

Adapun klasifikasi materi sebagai berikut:

Psikoedukasi, pemberian wawasan tentang kesehatan mental dilakukan melalui terapi dan konseling kelompok. Hal ini bertujuan untuk proses healing terhadap tekanan dan kecemasan yang dialami oleh para PMI sehingga diharapkan ke depannya mereka dapat melakukan proses terapi mandiri untuk mengatasi kecemasan.

Pembentukan komunitas, bertujuan untuk membentuk komunitas para PMI dalam mengembangkan kemandirian kerja, seperti pelaku wisata, pelaku ekonomi kreatif, UMKM, social e-commerce, dan pelaku seni. Komunitas yang diklasifikasikan sesuai bidang ini bertujuan untuk memfokuskan karir yang akan mereka geluti sesuai dengan keahlian masing-masing. Selain itu, dengan adanya komunitas ini diharapkan dapat memudahkan proses monitoring, evaluasi, pengembangan bakat dan minat, serta pelatihan lanjutan sesuai dengan bidang dan keahlian para PMI.

Evaluasi dan feedback, bertujuan untuk memonitoring para PMI selama beberapa tahun ke depan. Para PMI yang siap kembali ke tanah air dan memiliki kapasitas dan kesiapan kemandirian diberikan bantuan dana untuk membuka lapangan kerja di Indonesia.



Foto kegiatan PKM Malaysia

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan

Program PKM Internasional ini memberikan dampak positif kepada semua pihak yang terlibat khususnya kepada penerima manfaat yaitu PMI binaan KBRI Kuala Lumpur semakin bertambah pengetahuan, skill dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan sebagai PMI di Malaysia selama ini. Program PKM Internasional ini dapat menjadi awalan yang baik bagi penyiapan kemandirian PMI setelah dipulangkan ke Indonesia nantinya. Hal ini mengisyaratkan diperlukannya program-program pembinaan lanjutan bagi PMI setelah kepulangannya ke Indonesia.

Saran dan Rekomendasi

1. Kegiatan PKM Internasional ini agar dilaksanakan secara intensif satu atau dua bulan sekali untuk memberikan semangat dan ilmu pengetahuan kepada PMI yang sedang menghadapi berbagai masalah. Pelaksanaan disarankan secara luring/tatap muka.
2. Merekomendasikan kegiatan yang lebih fokus kepada pembinaan dan pelatihan keahlian yang dapat menjadi mata pencaharian PMI setelah kepulangan ke Indonesia. Disarankan kegiatan pelatihan yang terstandarisasi seperti mendapatkan sertifikat BNSP yang dapat dijadikan modal bagi PMI dalam mencari peluang kerja lainnya.
3. Pelaksanaan PKM Internasional semacam ini direkomendasikan untuk dilaksanakan di negara-negara lain yang mana memiliki PMI dalam jumlah yang besar.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih banyak kepada para pihak yang telah mensupport terselenggaranya PKM ini:

1. Rektor Universitas Mochammad Sroedji Jember.
2. Atase Pendidikan KBRI Malaysia.
3. LSM Sharing dan Persatuan Dosen Indonesia.
4. Pekerja Migran Indonesia negara penempatann Malaysia.
5. PPI UPSI Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswindo, M., Hanita, M., & Simon, A. J. (t.t.). Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia KERENTANAN DAN KETAHANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 The Vulnerability and Resilience of Indonesian Migrant Workers At Malaysia in the Midst of The COVID-19 Pandemic.
- Dan, W., & Kharisma, D. B. (2023). Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Waluyo. Dalam Dona Budi Kharisma) (Vol. 12, Nomor 1). <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode->
- Dewandaru, B., Rahmadi, A. N., & Sya'idah, E. H. (t.t.). Warmadewa Economic Development Journal Pemanfaatan Remitansi Pekerja Migran Indonesia Serta Peran Usaha Pekerja Migran Indonesia Purna Untuk Pembangunan Desa Asal. Warmadewa Economic Development Journal, 2(2), 2019–2063. <https://doi.org/10.22225/wedj.2.2.1297.44>
- Fadillah, A., Nopitasari, D., Bilda, W., Yanti, R., Sulisty, D. R., & Aini, I. D. N. (2023). Pelatihan Literasi Digital Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong. Jurnal Anugerah, 5(1), 33–40. <https://doi.org/10.31629/anugerah.v5i1.4867>
- Febrianti, N. Z., & Afifah, W. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MENGALAMI KEKERASAN DI LUAR NEGERI. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(1). <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.174>
- IMPLEMENTASI FUNGSI KEIMIGRASIAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

(Implementation of Immigration Function for Protection of Indonesian Migrant Workers). (t.t.).

Jungjung Simamora BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, H., & Gusti Johan, jalan. (2021). Penerapan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai Implementasi Good Governance Pengawasan Ketenagakerjaan. Jurnal Widya Swara Indonesia, 2(3), 137–148.

Lia Yunita, S., Novia Atmadani, R., Studi Farmasi, P., & Ilmu Kesehatan, F. (2021). IBM DAGUSIBU OBAT DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI TAIPEI, TAIWAN. 4(2).

Matompo, O. S., & Vivid Izziyana, W. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Perempuan Indonesia Non Prosedural di Saudi Arabia Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara. Dalam EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender (Vol. 17, Nomor 2).

Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa hingga Pertengahan 2023. (t.t.).

Priambodho, D. T. (t.t.). Penanganan Pengaduan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus di Jawa Timur Handling Indonesian Migrant Worker Complaints: A Case Study in East Java. <https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index>

Skaut, V., & Triputro, W. (t.t.). PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ILEGAL. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Sosiologi, J. P., Cahyana, N., Saputra, E., & Pierewan, A. C. (t.t.). PENGARUH MIGRASI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA.